



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
UPT PUSKESMAS PANARUKAN

PKM PANARUKAN | LAKIP | 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya UPT Puskesmas Panarukan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, walaupun dengan penuh keterbatasan dan kekurangan namun dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini pada dasarnya merupakan amanat dari Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang secara substantif mewajibkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja penyelenggaraanpemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban.

Kami sadar bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran senantiasa kami harapkan untuk perbaikan atau penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di tahun mendatang .

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini bermanfaat bagi UPT Puskesmas Panarukan dan juga pihak-pihak berkepentingan dalam mengevaluasi kinerja UPT Puskesmas Panarukan.

Situbondo, 3 Januari 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS PANARUKAN



dr. YUNI VEROSITA
NIP. 197706272010012014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.5 Struktur Organisasi.....	5
1.6 Kondisi Kepegawaian.....	5
1.7 Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Starategi (2021 – 2026)	8
2.1.1 Visi	8
2.1.2 Misi	8
2.1.3 Tujuan dan Sasaran.....	8
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	9
2.3 Perjanjian Kinerja 2023	11
2.4 Perencanaan Anggaran 2023	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Capaian kinerja.....	14
3.2 Analisis Capaian kinerja.....	39
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	25
4.2 Saran	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan. Kesemuanya harus terangkum dalam dokumen Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas akuntabilitas kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik untuk mewujudkan good governance.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Laporan Kinerja UPT Puskesmas Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026. Target kinerja yang harus dicapai UPT Puskesmas Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2023, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) UPT Puskesmas Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023.

Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah Kabupaten Situbondo dalam hal ini UPT Puskesmas Panarukan Kabupaten Situbondo dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja yang ada di lingkungan UPT Puskesmas Panarukan Kabupaten Situbondo. Penyusunan Laporan Kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja program kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat menjadi masukan dan umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas pada tahun mendatang.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 Tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah :

1. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan yang berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
2. Mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program dan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis UPT Puskesmas Panarukan Kabupaten Situbondo tahun 2021-2026;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahun berikutnya yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) UPT Puskesmas Panarukan Kabupaten Situbondo dan rencana kerja lima tahunan;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil UPT Puskesmas Panarukan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat;
5. Mewujudkan perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Situbondo di bidang kesehatan;
6. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan dalam tahun berikutnya;
7. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana Kerja program/ kegiatan UPT Puskesmas Panarukan Kabupaten Situbondo dalam mengkoordinasikan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan di daerah.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

- Tugas Pokok Puskesmas
Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- Fungsi Puskesmas
 - a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

1.5 Struktur Organisasi



1.6 Kondisi Kepegawaian

No.	Jabatan	Status Kepegawaian				
		P N S	TugasBelajar	P T T	Kontrak	MAGANG
1	Kepala Puskesmas	1	-	-	-	-
2	Dokter Gigi	1	-	-	-	-
3	DokterUmum	1	-	-	1	-
3	Perawat Gigi	-	-	-	-	1
4	Perawat	8	-	-	4	10
5	Bidan	16	-	-	-	12
6	Gizi	1	-	-	-	5
7	Sanitarian	-	-	-	1	-
8	Apoteker	1	-	-	-	-
9	AsistenApoteker	1	-	-	-	-
10	Analisis	1	-	-	-	-
11	Rekam Medik	1	-	-	-	1
12	Promkes	-	-	-	1	-
13	Administrasi Kesehatan	1	-	-	-	-
13	IT	-	-	-	1	-
14	Akuntan	-	-	-	1	-
15	Pengelola Keuangan	2	-	-	1	-
16	AdministrasiUmum	5	-	-	12	1
J U M L A H		40	-		22	30

Sumber data: Data Kepegawaian Puskesmas Panarukan Tahun 2023

1.7 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 terdiri dari beberapa bagian , yakni sebagai berikut :

Bab 1 : Pendahuluan

Bab ini berisi penjelasan tentang Latar belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Kondisi Kepegawaian dan Sistematika Penyajiannya.

Bab 2 : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab ini berisi penjelasan Rencana Strategis 2021 – 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja 2023, Perencanaan Anggaran 2023

Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi penjelasan Pengukuran Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja Anggaran.

Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi penjelasan Pengukuran Capaian Kinerja dan Analisis Capaian Kinerja.

Bab 4 : Penutup

Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

Lampiran – lampiran

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2021 – 2026

2.1.1 Visi

Mewujudkan Masyarakat Situbondo Yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya

2.1.2 Misi

Membangun Masyarakat Situbondo Sehat, Cerdas dan Meningkatkan Peran Perempuan

2.1.3 Tujuan Dan Sasaran

- Tujuan Umum

Meningkatkan cakupan pelayanan semua program di puskesmas sesuai dengan masalah yang dihadapi UPT Puskesmas Panarukan sehingga dapat meningkatkan fungsi puskesmas secara efektif dan efisien.

- Tujuan Khusus

1. Menganalisa permasalahan setiap program baik program esensial maupun program pengembangan di wilayah kerja UPT Puskesmas Panarukan
2. Meningkatkan akses keluarga beserta anggotanya terhadap pelayanan program kesehatan masyarakat yang komprehensif meliputi; pelayanan, promotif, preventif dan kuratif
3. Mendukung pencapaian Standart Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten melalui peningkatan akses semua program kesehatan masyarakat
4. Mendukung pelaksanaan JKN dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN
5. Mendukung tercapainya tujuan Program Indonesia Sehat / PISPK dalam Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

- Sasaran

NO.	SASARAN	L	P	JUMLAH
1.	Penduduk keseluruhan	27.743	28.749	56.492
2.	Penduduk usia remaja (15-19 th)	1.863	1.732	3.595
3.	Penduduk usia produktif (15-59 th)	17.830	18.13	35.943
4.	Bumil			835
5.	Bulin			800
6.	Bufas			800
7.	Bayi (<1 th)	821	770	1.591
8.	Balita (0-4 th)	2.046	1.890	3.936

9.	Apras (5-6 th)	800	796	1.596
10.	Anak sekolah / Pendidikan Dasar (7-15 th)	2.634	2.476	5.110
11.	WUS (15-49 th) non bumil			19.827
12.	WUS (30-50 th) menikah			6.840
13.	PUS			9.604
14.	LANSIA (\geq 60 th)	4.006	4.809	8.815
15.	Usia Produktif (15-59 th)	17.851	18.153	36.004

Sumber : data sasaran penduduk Tahun 2023 (Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo)

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Pengukuran	Unit Terkait dan Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatkannya status kesehatan masyarakat & kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Prosentase puskesmas yang memiliki nilai IKM $>76,6$	Jumlah Nilai IKM Puskesmas > 76 / Jumlah Puskesmas x 100%	Laporan Hasil IKM Puskesmas	Dinkes

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya akses dan mutu kesehatan	Meningkatnya status kesehatan masyarakat & kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Prosentase Puskesmas yang memiliki nilai IKM $> 76,6$	81%	81%	81,5%	82,5%	82,5%	83%

2.3 Perjanjian Kinerja

2.3.1 Perjanjian Kinerja 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA	TRIMESTER				SATUAN				
				TW I	TW II	TW III	TW IV					
1.	Meningkatnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	100		20		30		40		10	%
		2. Prosentase Program UKM Pengembangan yang	100		20		30		40		10	%

		tercapai sesuai standart												
		3. Prosentase Program UKP yang tercapai sesuai standart	100		30		30		30		10			
2.	Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100		70		10		10		10			%
3	Meningkatnya Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100		10		10		40		40			%
4	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100		10		30		30		30			%
5	Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Puskesmas memiliki Nilai IKM >76,6	85,5								85,59			%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	2.223.613.131,00
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp.	1.046.207.000,00
3.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp.	-

4.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp.	8.195.000,00
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN	Rp.	3.278.015.131,00

2.3.2 Perjanjian Kinerja 2023

N O	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARG ET KINE RJA	TW I		TW II		TW III		TW IV		SATU AN
1.	Meningkatnya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4. Prosentase Program UKM Essensial yang tercapai sesuai standart	100		20		30		40		10	%
		5. Prosentase Program UKM Pengembangan yang tercapai sesuai standart	100		20		30		40		10	%
		6. Prosentase Program UKP yang tercapai sesuai standart	100		30		30		30		10	
2.	Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan SDM Kesehatan (minimal memiliki jenis tenaga kesehatan) sesuai standar	100		70		10		10		10	%
3	Meningkatnya Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Prosentase Posyandu menjadi Purnama Mandiri (PURI)	100		10		10		40		40	%
4	Meningkatnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap > 90%	100		10		30		30		30	%
5	Meningkatnya	Puskesmas	85,5								85,5	%

Status Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	memiliki Nilai IKM >76,6																			9	
---	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	2.223.613.131,00
2.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp.	1.046.207.000,00
3.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp.	7.750.000,00
4.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp.	127.416.112,00
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp.	150.785.000,00
	JUMLAH TOTAL ANGGARAN	Rp.	3.392.416.100,00

2.4 Perencanaan Anggaran 2023 (ANGGARAN PROGRAM UKP, UKM DAN PROGRAM PENUNJANG)

No	Nama Program	Jumlah Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.223.613.131	BLUD
2.	<p>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga TB • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Surveilans • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular • Operasional Pelayanan Puskesmas • Pelayanan Kesehatan Dasar melalui pendekatan keluarga 	1,046,207,000	BOK
3.	<p>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis • Supervisi • Pengembangan dan pelaksanaan UKBM 	8.195.000,00	BOK
Jumlah Total Anggaran		3.278.015.131,00	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

3.1.1 Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)

Hasil capaian PKP Puskesmas Panarukan tahun 2023 sebagai berikut:

No	Upaya Kesehatan dan Program	Rata-Rata Variabel	Rata-Rata Program
I	Manajemen Puskesmas		9,10
1	Manajemen Umum	9,39	
2	Manajemen Peralatan dan Sarana Prasarana	9,60	
3	Manajemen Keuangan	9,25	
4	Manajemen Sumber Daya Manusia	7,75	
5	Manajemen Pelayanan Kefarmasian	10	
6	Manajemen Data, Informasi dan SPM	9,64	
7	Manajemen Penanggulangan Krisis Kesehatan	9,40	
8	Manajemen Pembiayaan	7,42	
II	UKM ESensial		95,63
1	Upaya Promosi Kesehatan	96,46	
2	Upaya Kesehatan Lingkungan	92,94	
3	Upaya Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana	94,60	
4	Upaya Pelayanan Gizi	94,38	
5	Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	91,89	
6	Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)	100	
III	UKM Pengembangan		99,34
1	Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100	
2	Penanganan Masalah Penyalahgunaan Napza	100	
3	Kesehatan Matra (Pencegahan dan Imunisasi)	100	
4	Pelayanan Kesehatan Tradisional	100	
5	Pelayanan Kesehatan Olahraga	95,41	
6	Pelayanan Kesehatan Kerja	100	
7	Kefarmasian	100	
IV	UKP		93,71
1	Pelayanan Non Rawat Inap	92,43	
2	Pelayanan Gawat Darurat	100	
3	Pelayanan Kefarmasian	100	
4	Pelayanan Laboratorium	100	
5	Rawat Inap	100	
6	Rujukan	99,30	
V	Mutu		92,78

1	Indikator Nasional Mutu (INM)	78,34	
2	Indikator Keselamatan Pasien	100	
3	Pelaporan Insiden	100	

3.1.2 Standart Penilaian Minimum (SPM)

No	Jenis Layanan Dasar	Target Kinerja	Realisasi s/d TW 4	Sasaran	Capaian Kinerja
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	835	445	Ibu hamil	53%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	800	791	Ibu bersalin	99%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	763	764	Bayi	100%
4.	Pelayanan kesehatan balita	3130	2334	Balita	75%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	5120	5014	Anak	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	35943	35943	Orang	100%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	9124	9124	Orang	100%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	12128	12139	Orang	100%
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes milletus	1268	1286	Orang	101%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	108	93	Orang	86%
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	757	743	Orang	98%
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	975	834	Orang	96%

3.1.3 Indikator Nasional Mutu (INM)

No	Indikator Nasional Mutu	Target Tahun 2023	Total Sasaran	Target Sasaran	Pencapaian	Riil	Capaian
1.	Kepatuhan Kebersihan Tangan	85%	2400	2040	2314	96,42%	100%
2.	Kepatuhan Penggunaan	100%	439	439	439	100%	100%

	Alat Pelindung Diri (APD)						
3.	Kepatuhan Identifikasi Pasien	100%	303	303	303	100%	100%
4.	Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Sensitif Obat (SO)	100%	112	112	62	55%	55%
5.	Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan ANC Sesuai Standar	100%	835	835	259	31%	31%
6.	Kepuasan Pasien	76,61	370	76,61	85,8	100%	100%
Jumlah nilai Indikator Nasional Mutu							81%

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Analisis Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP)

No	Program	Umpan Balik	RTL
A	Manajemen		
1.	Sungram	1. Dokumen renstra, RUK sudah ada, hanya RUK 2023 belum ditandatangani	
		2. Ketepatan waktu pelaporan masih kurang	
		3. Mengarsip pengumpulan laporan, menggunakan Google Drive untuk pengumpulan laporan	
2.	Umum	1. Penulisan RKP kepengkatan tolong disesuaikan kepengkatannya	
		2. Mutasi keluar masuk induk dan wilayah tolong dimasukkan ke daftar mutasi kepala puskesmas dan ditandatangani di akhir tahun	
		3. Melengkapi buku pembinaan dengan foto dokumentasi dan data rencana tindak lanjutnya	
		4. Upload SKP di aplikasi MILEA dan SIKALAP	
3.	SDM	1. Renbut belum ada analisa perhitungan kebutuhan berdasarkan ABK, SKM dan antar AKB dan SDM	
		2. Perhitungan AKB belum sinkron yang dimasukkan masih hasil tahun 2021	
		3. SK dan uraian tugas dari 90 SK masih 23 orang yang ada SK	
		4. SDM monitoring dari pusat kevalidan data masih 61 %, dimaksimalkan pada	

		bulan februari untuk data SISDMK untuk tiket mendaftar PPPK	
		5. Kelengkapan data SISDMK, diupdate dan dilengkapi dengan valid	
		6. Materi pengembangan SDM masih belum lengkap masih 25 % yang tercatat matrik pengembangan SDM	
		7. Rencana tindak lanjut dan analisa belum tercantum	
		8. Untuk renbut tahun 2024 lampiran data ketersediaan SDM adalah data desk tahun sebelumnya yang dibutuhkan bulan februari tahun berjalan	
		9. Belum ada PJ dokumen kepegawaian terkait STR dan SIP	
4.	Farmalkes	1. Mengalokasikan anggaran obat PRB yang bisa diklaim ke BPJS	PJ UKP berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas untuk mengadvokasi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mereview MOU dengan BPJS
		2. Maksimalkan pemberian suplemen ASI untuk menekan stunting dan kematian bayi	
		3. Maksimalkan pemeriksaan laboratorium prolanis, hasilnya bisa diklaimkan ke BPJS	PJ UKP berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas untuk mengadvokasi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mereview MOU dengan BPJS
		4. Hasil analisi ASPAK ditindaklanjuti dengan pengajuan pemenuhan baik lewat BLUD/Dinkes	
		5. Ketidaksesuaian pengajuan kalibrasi dengan DPA bisa diajukan saat PAK	
5.	Biakes		
a.	Manajemen BOK	1. Realisasi tahun 2023 hanya 81 %, tahun 2024 ditingkatkan lagi agar bisa 90 %	
		2. Ketepatan laporan dan SPJ tolong ditingkatkan	
b.	Manajemen JKN	1. Angka kontak belum tercapai dan prolanis	1. Meningkatkan kunjungan sehat 2. Petugas memberikan edukasi kepada pasien DM berkenaan dengan pemeriksaan gula darah puasa
		2. Sehati realisasi jasar dan jaspel masih dibawah 50%	
B	UKM ESENSIAL		

1.	Promkes	1. PHBS rumah tangga belum tercapai terutama angka merokok di dalam rumah. Tolong diperbaiki dari puskesmas terlebih dahulu dan dibantu dari programer lain	
		2. Meningkatkan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru di sekolah	
		3. Posyandu Puri belum tercapai, intervensi PHBS 20 % dari total KK di desa. Lakukan evaluasi ulang dari hasil PKP	
		4. Membuat SK posyandu, mendata biodata kader serta nomor rekeningnya dan membantu kader menginput data agar minggu ini disetorkan untuk honor insentif kader	
2.	Kesling	1. Melakukan pendataan lagi untuk sarana air bersih karena data tidak rasional	
		2. Validasi data setiap bulan	
		3. Bekerjasama dengan Balai pengobatan untuk mengoptimalkan klinik sanitasi, penyakit yang berbasis lingkungan dirujuk ke klinik sanitasi	
3.	KIA-KB-Lansia		
a.	KIA	1. Capaian K4 rendah, K1 akses masih tinggi dan capaian K6 masih rendah	
		2. Capaian Drop out K4 sebanyak 54 %, tinggi sekali	
		3. Capaian Bayi paripurna 39% karena IDL masih rendah. IDL termasuk syarat bayi paripurna	
		4. Capaian Balita paripurna rendah	
		5. Capaian Anak prasekolah rendah	
		6. Capaian calon pengantin rendah, ada MOU 3 OPD semua calon pengantin harus mendapatkan pelayanan di puskesmas	
		7. PUS Alki dan PUS 4T banyak yang tidak mengikuti program KB, tolong tingkatkan	
		8. Tingkatkan lagi koordinasi dan komunikasi dengan lintas sektor dan lintas program	
		9. Meningkatkan kegiatan	

		Berlian bersinar	
		10. Membentuk Pembinaan jejaring	
		11. Tahun 2023 ada 2 kematian ibu nifas karena eklampsi dan pendarahan postpartum. Diharapkan bidan desa lebih memaksimalkan kunjungan atau kontak dengan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Panarukan	
		12. ANC terpadu ibu hamil belum di skrining DM dan PE	
		13. Mengawal pendampingan kader pada ibu hamil, harapannya tidak hanya untuk menurunkan AKI, AKB dan capaian K4 saja tapi juga meningkatkan K1 murni	
		14. Ibu hamil komplikasi belum terpantau, form triple eliminasi belum ada	
		15. Melakukan tatalaksana pada ibu hamil anemia karena TM 2 belum di skrining ulang	
		16. Ibu hamil sudah di skrining tapi belum diimunisasi TT	
b.	Ausrem	1. Pendidikan anak usia remaja tidak 100 % karena jadwal pelaksanaan berbarengan dengan jadwal vaksinasi	
		2. Melakukan validasi laporan tiap bulan	
		3. Melakukan sosialisasi karena tidak pandemi tolong dilakukan secara langsung datang ke puskesmas	
		4. Posyandu remaja sudah bertambah tolong dibarengi dengan peningkatan pelayanan remaja di puskesmas	
c.	Lansia	1. Memperbaiki sistem laporan, ada 1 desa yang tidak mengisi kohort	
		2. Ada 1 desa hanya ada 40 lansia	
		3. Tertib laporan dan lakukan validasi kohort setiap bulan	
		4. Konsultasi pada dinas kesehatan jika programer belum memahami Definisi Operasional masing-masing indikator	
d.	Kespro	Perlu melakukan validasi	

		kembali di Bulan Januari karena PA terlalu tinggi	
4.	Gizi	1. Pemberian Vit A belum tercapai karena banyak balita yang pindah dan ada yang bertempat tinggal di perumahan	
		2. D/S tidak tercapai karena biasa dikunjungi jadi tidak ada yang datang ke posyandu	
		3. Memberikan sosialisasi pada ibu balita tentang PMBA untuk meningkatkan capaian N/D	
		4. Melakukan KIE pada masyarakat tentang ASI eksklusif karena ibu menyusui kurang dukungan dari keluarga sehingga pemberian ASI kurang maksimal	
		5. Meningkatkan pemeriksaan calon pengantin wanita ke puskesmas karena sudah MUO dan di kawal untuk K1 murni	
5.	P2		
a.	Diare & ISPA	Meningkatkan koordinasi pada jejaringnya karena capaian diare masih 90%	
b.	TB	1. Meningkatkan konseling lintas profesi	
		2. Pemeriksaan suspect jangan terlalu ketat agar bisa meningkatkan capaian suspect	
		3. Angka keberhasilan TB PMO selain kader bisa melibatkan keluarga	
c.	Kusta	Kader posyandu yang telah mendapat sosialisasi kusta belum tercapai perlu ditingkatkan lagi, bisa didelegasikan ke penanggung jawab wilayah tidak harus programernya	
d.	Survim	1. Dari 8 desa di Panarukan tidak ada yang UCI, lakukan Focus Group Discussion (FGD) agar bisa mengangkat permasalahan di Puskesmas Panarukan	
		2. Laporan KIPI baru diinput bulan maret mohon untuk setiap ada KIPI dientri di website KIPI baik KIPI serius maupun tidak serius agar bsa dilihat oleh kemenkes	
		3. Aplikasi ASIK sudah diinput hanya BIAS yang	

		belum diisi, jika diisi lewat dari tanggal pelayanan akan menjadi riwayat imunisasi	
		4. Utilisasi ASIK diharap 100%	
		5. Meningkatkan pengawasan PD3I bagi petugas baru karena tidak ada UCI di 1 desa dari 8 desa	
		6. Untuk semua petugas jika menemukan kasus PD3I segera dilaporkan agar segera dilakukan tatalaksana agar tidak terjadi ORI difteri	
e.	PTM	Capaian IVA masih dibawah target, melakukan konseling dan pemeriksaan IVA pada sasaran sebelum pemasangan implant dan IUD agar capaian IVA meningkat atau dikondisikan bersamaan	
C	UKM PENGEMBANGAN		
1.	Kesjaor	1. Melengkapi register club olahraga	
		2. Meningkatkan Pelaksanaan program karena capaian masih minim	
		3. Meningkatkan program kebugaran 1 tahun sekali	
		4. Melakukan peregangan 1 kali 1 hari	
2.	UKK	1. Melakukan pembinaan pada kelompok UKK lama dan baru	
		2. Pembentukan UKK baru tolong dibuat tiap desa 1	
D	UKP		
1.	Rawat Jalan	1. Perlu memperbaiki rekam medis rawat jalan	Refreshing pengisian rekam medis
		2. Tahun 2023 register tidak perlu ditulis, langsung diprint banyak sikda yang tidak bridging ke P-care hal tersebut menyebabkan data gantung pada aplikasi P-care, jika dirasa sulit sebaiknya menggunakan register manual	-
2.	Rujukan	1. UGD sudah bagus, sisrut sudah aktif dan user sudah bertambah	Pengaktifan kembali penggunaan sisrute
		2. MOU sudah lengkap tapi sudah kadaluarsa perlu diupdate	Update MOU rujukan dengan RS
		3. Peta respon sudah bagus, setiap desa setiap bencana	-
E	MUTU		

1.	Manajemen Mutu	1. Update SK untuk menampilkan angka absolut	
		2. Audit internal dan manajemen resiko perlu refreshing	
		3. INM dan IPK OK tapi perlu dilaporkan lagi diaplikasi INM	
2.	Pengaduan	1. Ada peningkatan kasus dari tahun 2021 ke tahun 2022, ada kasus pengaduan yang terlewatkan	
		2. Membuat rekapan pengaduan masing-masing media dan masing-masing kasus	
		3. Persyaratan akreditasi ada 8 indikator masih 87% dari STR dan SIP yang belum terpenuhi perlu update data di aplikasi SISDMK	
		4. Belum ada PJ dokumen kepegawaian terkait STR dan SIP	

3.2.2 Analisis Standart Penilaian Minimum (SPM)

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator Kinerja	Evaluasi	RTL
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Petugas belum optimal dalam menemukan K1 murni	Koordinasi linprog dengan PJ jaringan jejaringan dalam meningkatkan penemuan K1 murni
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Tercapai	-
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	Tercapai	-
4.	Pelayanan kesehatan balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Rendahnya cakupan imunisasi	1. Optimalisasi pemanfaatan kohort balita untuk maping sasaran imunisasi 2. Koordinasi linsek untuk mengaktifkan kembali kegiatan imunisasi post pandemi
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Kegiatan belajar mengajar secara tatap muka belum optimal (kondisi pandemi Covid-19)	Koordinasi linprog untuk melakukan kunjungan sekolah secara terpadu
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Setiap warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan	Tercapai	-

		elayanan kesehatan sesuai standar		
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Setiap warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	Tercapai	-
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tercapai	-
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes milletus	Setiap penderita diabetes milletusi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tercapai	-
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tercapai	-
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Setiap orang terduga tuberculosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tercapai	-
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Setiap orang dengan resiko HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Tercapai	-

3.2.3 Analisis Indikator Nasional Mutu (INM)

No.	Prioritas Masalah	Prioritas Penyebab Masalah	Alternatif Pemecahan Masalah	Pemecahan Masalah Terpilih
1.	Rendahnya pencapaian Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan ANC Sesuai Standar di wilayah Puskesmas Panarukan (31%)	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya penemuan K1 Pelayanan K4-K6 masih Belum Maksimal Pendampingan Calon Pengantin Wanita (CPW) belum 	<ol style="list-style-type: none"> Petugas melakukan koordinasi dengan lintas sector (Kader) untuk penemuan K1 Petugas melakukan kerja sama dengan lintas sector untuk pelayanan K4 Petugas melakukan kerja sama lintas sector untuk pendampingan Calon Pengantin 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi bersama lintas sektor melalui loka karya mini lintas sektor Pemberian insentif kepada kader yang mengantarkan bumil K1 Petugas melakukan Koordinasi dengan Kaur Kesrah untuk

		Maksimal	Wanita (CPW) agar mendapatkan pelayanan K1 saat setelah hamil	melakukan pendampingan Calon Pengantin Wanita (CPW) melalui WA Grup terdiri dari Bidan Desa, Kaur Kesra Desa, CPW dan Kader
2.	Rendahnya Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Sensitif Obat (SO) (55%)	1. Rendahnya dukungan keluarga untuk pengobatan TB karena efek samping obat TB	1. Edukasi pasien dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan TB selama 6 Bulan 2. Melakukan kunjungan rumah dan pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada keluarga pasien TB	1. Edukasi pasien dan keluarga pasien untuk melakukan pengobatan TB selama 6 Bulan 2. Melakukan kunjungan rumah dan pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT) pada keluarga pasien TB

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran, melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisa terhadap pengukuran kinerja. LAKIP Puskesmas Panarukan tersebut dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan teknis Tahun 2023. Seluruh kegiatan yang tertuang dalam laporan ini merupakan hasil sinergis antara Puskesmas Panarukan dengan Instansi terkait dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian Akuntabilitas kinerja Puskesmas Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 dari 5 sasaran dan 5 indikator kinerja dapat tercapai dengan **Baik**.

Jadi dapat disimpulkan nilai rata-rata pencapaian kinerja Puskesmas Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2023 yaitu $5/5 \times 100$ sebesar 100%.

4.2 Saran

Dengan disusunnya akuntabilitas kinerja Puskesmas Panarukan Kabupaten Situbondo diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan Bapak Bupati Situbondo sesuai dengan sumber daya aparatur dan dana yang dimiliki serta dapat digunakan sebagai bahan perbaikan berkesinambungan dan merumuskan kebijakan selanjutnya.

Laporan yang kami susun, apabila ada kesalahan mohon untuk memberikan saran dan rekomendasi sebagai *continues quality improvement*.